

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari temuan dan pembahasan penelitian ini adalah upaya pemenuhan hak pilih pekerja di Kabupaten Pelalawan telah dilakukan dengan praktik *collaborative governance*. Bukti konkret upaya pemenuhan hak pilih ini dapat dilihat pada pembentukan TPS di Lokasi Khusus. Aktor utama yang terlibat dari sektor pemerintah adalah KPU Kabupaten Pelalawan, sedangkan dari sektor swasta adalah PT. RAPP. Kedua aktor ini melakukan kolaborasi didukung oleh sejarah kerja sama yang baik, tidak memiliki sumber daya yang dimiliki oleh pihak lain, dan kesamaan persepsi mengenai pemenuhan hak pilih pekerja. Desain institusional kolaborasi ini berupa dokumen Berita Acara Pembentukan TPS di Lokasi Khusus yang memuat peran masing-masing aktor. Baik KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP mempraktikkan sikap kepemimpinan fasilitatif dengan membuka jalur komunikasi dari banyak arah. Proses kolaboratif dilakukan dengan beberapa kali pertemuan tatap muka yang dilakukan secara rutin sesuai dengan tahapan pemilu dan masing-masing aktor fokus pada tujuan akhir sehingga menerapkan sikap toleransi dan kompromi atas kepentingan pihak lain.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendukung terciptanya hubungan kolaborasi yang baik antara lain:

- 1) Memiliki tujuan kolaborasi yang sama antar pemangku kepentingan dan berkomitmen terhadap hal itu, dapat dicantumkan dalam sebuah kesepakatan tertulis;
- 2) Jalur komunikasi yang efektif dan efisien, terlihat bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan pendekatan informal;
- 3) Transparansi atas kekurangan dan kebutuhan sumber daya masing-masing pemangku kepentingan dengan tujuan dapat melakukan berbagi sumber daya; dan

- 4) Rasa toleransi dan kompromi antar pemangku kepentingan, sehingga dapat menekan ego sektoral yang mengancam tercapainya tujuan akhir dari kolaborasi.

Peneliti berkesimpulan bahwa keempat poin di atas dialami oleh KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP dalam memulai kolaborasi.

Namun, hasil penelitian ini menemukan adanya peran pekerja PT. RAPP dan masyarakat sekitar yang memiliki peran sebagai aktor pendukung. Tidak signifikannya peran pekerja PT. RAPP untuk pemenuhan hak pilihnya karena regulasi yang mengatur pembentukan TPS di Lokasi Khusus, yakni Peraturan KPU yang tidak mendukung peran aktif pekerja. Mestinya, pekerja memiliki peran yang cukup krusial karena dengan adanya aspirasi dari pekerja, muncullah motivasi PT. RAPP untuk berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Pelalawan dan hal ini tidak terjadi pada perusahaan-perusahaan lainnya di Kabupaten Pelalawan. Pekerja mengetahui secara langsung apa yang diperlukan untuk pemenuhan hak pilihnya. Peraturan KPU hanya dapat memfasilitasi TPS di Lokasi Khusus untuk pekerja hanya bila ada motivasi dari pihak perusahaan sebagai pihak yang berwenang di lokasi khusus yang mau berkolaborasi.

Peneliti berkesimpulan kolaborasi antara KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP dalam upaya pemenuhan hak pilih pekerja hanya sebatas pada pembentukan TPS di Lokasi Khusus untuk pekerja saja. Namun peneliti menilai kolaborasi ini dapat diteruskan dengan tahapan-tahapan pemilu lainnya seperti tahapan sosialisasi hak politik pekerja. Pertemuan-pertemuan yang berlangsung antara KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP hanya sekali yang melibatkan pekerja, ini pun hanya sampai pada level mandor, tidak sampai pekerja pada tingkat paling bawah. Apabila hal ini dilakukan, Peneliti berkeyakinan akan ada implikasi pada tingkat partisipasi pekerja karena pembahasan mengenai upaya pemenuhan hak pilih pekerja akan bermuara pada kesadaran politik pekerja yang dapat dicapai melalui sosialisasi dan pendidikan politik secara intens.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini menggambarkan analisis isu dengan perspektif kerangka kerja Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash. Melalui studi kasus ini, penelitian ini menunjukkan bagaimana kerangka kerja tersebut dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi tantangan pemenuhan hak pilih pekerja perkebunan di Kabupaten Pelalawan. Sebagai penelitian studi kasus, tentu masih banyak ruang yang terbuka dalam bahasan *collaborative governance* sehingga peneliti menyarankan penelitian selanjutnya untuk menggabungkan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

Selanjutnya, model *collaborative governance* dapat digunakan sebagai basis penyelesaian berbagai masalah publik yang melibatkan banyak pihak. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis fenomena-fenomena dari sektor lain, seperti sektor pendidikan, kesehatan, atau lingkungan, untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *collaborative governance* dapat diterapkan di berbagai konteks. Konsep *collaborative governance* sebagai upaya pemenuhan hak pilih pekerja perkebunan yang diwujudkan dengan pembentukan TPS di lokasi khusus oleh KPU merupakan solusi efektif dalam memfasilitasi pekerja untuk melaksanakan hak pilih mereka.

Penelitian selanjutnya mengenai pemenuhan hak pilih pekerja dapat menasar pada fenomena rendahnya partisipasi pemilih pada TPS di Lokasi Khusus Kabupaten Pelalawan dengan basis temuan penelitian ini. Dapat dilihat perbedaan tingkat partisipasi pemilih TPS di Lokasi Khusus yang semua pemilih adalah pekerja PT. RAPP ber-KTP elektronik luar Kabupaten Pelalawan. Jika dibandingkan dengan beberapa TPS reguler sekitar akan tampak partisipasi pemilih TPS di Lokasi Khusus selalu lebih rendah. Penelitian selanjutnya ini akan menarik dalam kajian perilaku memilih.

### 6.2.2 Saran Praktis

Peneliti menyadari kolaborasi antara KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP ini memiliki keterbatasan, karena KPU Kabupaten Pelalawan hanya dapat melaksanakan kolaborasi dengan perusahaan yang bersedia berpartisipasi. Tidak ada keharusan bagi semua perusahaan untuk memfasilitasi pembentukan TPS bagi pekerjanya, yang menjadi hambatan dalam mencapai cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pembuat kebijakan memberikan perhatian lebih terhadap isu ini. Kebijakan yang lebih inklusif dan mandat yang lebih jelas dapat memastikan bahwa semua perusahaan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemenuhan hak pilih pekerja.

KPU sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat membentuk sinergi yang berkelanjutan dengan perusahaan sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan pemilu yang adil dan aksesibel. Penelitian ini menekankan pentingnya desain institusional internal yang kuat dan komitmen awal yang kokoh untuk membentuk dasar kolaborasi yang berhasil. Dengan toleransi dan kompromi, KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP telah menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat mengatasi perbedaan kepentingan dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Sinergi ini tidak hanya membantu dalam jangka pendek tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pekerja dan masyarakat sekitar. KPU juga dapat membuat suatu kebijakan yang memungkinkan serikat pekerja dapat mengajukan permohonan fasilitasi TPS di Lokasi Khusus, tidak hanya melalui manajemen perusahaan. Peneliti menilai bahwa hal ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan kesadaran politik pekerja. Serta kebijakan mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih khususnya yang menyasar masyarakat kategori pekerja.